

MANAJEMEN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIS PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

(Studi Deskriptif pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung)

oleh Muntiyono, Sutaryat Trisnamansyah, Iim Wasliman, Hanafiah
muntibdg@yahoo.com

ABSTRACT

This study takes the title: "Management of Education Systems and Training in Competency Improvement of Government Technical Procurement of Goods / Services Procurement" which is a Descriptive Study at the IV Public Works and Public Housing Education and Training Center of Bandung. The study aims to obtain findings in the field relating to (1) Planning (2) Organizing (3) Implementation (4) Evaluation and (5) Results of graduates of Education and Training. Using descriptive analysis method with a qualitative approach. Findings (1) there is no Education and Training Renstra, and attitude / behavior material, (2) not detailed activity schedule, (3) Need of Cost Director, basic level of PBJP certification passing rate (30%), (4) appropriate evaluation, (5) there are participants who do not want to pass basic certification. The conclusions are to improve the planning, organization, implementation, evaluation and results of the education and training graduates.

Keywords: *Management Training system, Government procurement of goods/ services, competency, Technical Staff.*

Pendahuluan

Sumber Daya Manusia penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompeten/ bersertifikat tingkat dasar masih sangat kurang termasuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah, dalam hal ini oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia melalui Lembaga Pendidikan Pengadaan di seluruh Indonesia yang terakreditasi.

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa: Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dalam melaksanakan tugas tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada waktunya, untuk itu diperlukan PNS yang profesional dibidangnya. Dalam hal ini adalah PNS yang diberi tugas untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil menyatakan bahwa Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi. Sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan suatu organisasi, dengan melakukan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian akan mempermudah penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

Pada tahun anggaran 2016 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan Anggaran dengan Kebijakan dalam peningkatan pendapatan negara antara lain dengan menggulirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan optimalisasi perpajakan, peningkatan lifting, penyesuaian

target dividen Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , perbaikan pengawasan pengelolaan sumberdaya alam dan penyesuaian tarif pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari alokasi Belanja Negara sebesar Rp2.095,7 Triliun untuk melanjutkan program prioritas nasional (antara lain infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan serta pertahanan) untuk memperbaiki kualitas pembangunan mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari nilai belanja Kementerian/ Lembaga tersebut setelah dikurangi oleh pembayaran gaji selebihnya digunakan belanja yang menggunakan peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

Pengelolaan Belanja tersebut di atas perlu tenaga teknis yang Kompeten yang meliputi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap/Perilaku.

Zihan Syahayani, (Kompas.com, 28/9/2017) Peneliti Bidang Hukum di *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research*. Zihan@theindonesianinstitute.com mengemukakan hampir 80% kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam Laporan Tahunan KPK 2016 menyebutkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa adalah titik rawan tindak pidana korupsi, di samping sektor atau bidang perencanaan dan pengelolaan APBD (Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah), serta pelayanan perizinan (Lapah KPK, 2016). Titik rawan penyimpangan di sektor PBJ selama ini telah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini, cenderung terjadi penggelembungan (*mark-up*) anggaran yang merugikan keuangan negara. Kerawanan penyimpangan juga terjadi pada tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi

perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri.

Dalam mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terhindar dari penyimpangan, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait.

Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu tenaga teknis yang kompeten sehingga perlu diatur kelembagaannya di tiap K/L/D/I dengan masing-masing personil mempunyai kompetensinya. Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/ institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan Pengadaan dilakukan melalui: a. Swakelola; dan/ atau b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi :a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya.

Hasil ujian sertifikasi keahlian tingkat dasar pada tahun 2016 secara nasional tingkat kelulusannya rata-rata 26% seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kelulusan sertifikasi PBJ tahun 2016

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bulan Nopember 2016								
No	Bulan	Jumlah Pelaksanaan Ujian	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Terdaftar	Kehadiran		Kelulusan	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	Januari	16	905	720	645	90%	232	36%
2	Februari	68	3.475	3.475	2.320	67%	613	26%
3	Maret	90	4.590	4.590	3.553	77%	775	22%
4	April	114	6.351	5.221	4.699	90%	1.073	23%
5	Mei	102	5.154	4.704	4.143	88%	871	21%
6	Juni	54	2.692	2.742	2.394	87%	437	18%
7	Juli	47	1.621	1.469	1.353	92%	343	25%
8	Agustus	112	4.195	3.482	3.131	90%	1.823	58%
9	September	125	5.147	4.004	3.687	92%	1.020	28%
10	Oktober	122	5.357	4.161	3.760	90%	832	22%
11	Nopember	156	6.249	6.249	5.799	93%	1.380	24%
Total		1.006	45.736	40.817	35.484	87%	9.399	26%

Sumber: laporan ujian sertifikasi

Dari tabel tersebut di atas terlihat rendahnya kelulusan di berbagai daerah, sehingga pemahaman tentang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih perlu dipacu agar para pengelola mempunyai persepsi yang sama. Sertifikasi merupakan syarat yang harus dimiliki oleh para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, dan hal ini sekaligus sebagai pengakuan kompetensi dari pegawai yang bersangkutan.

Kegiatan Diklat di Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung sebanyak 34 kegiatan yang terdiri dari diklat Teknis kePUan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pembentukan Jabatan Fungsional, *Training of Trainer* dan Kepemimpinan. Diklat Teknis kePUan termasuk Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai waktu antara 5 sampai 12 hari sedangkan untuk diklat pim dengan sistem *on/off* waktunya 92 hari.

Pendidikan Pengadaan Barang/ Jasa dalam tahun anggaran 2016 mengelola 3 (tiga) kali Diklat pada triwulan I satu kali, pada triwulan II satu kali dan pada triwulan III satu kali. Tingkat kelulusan 30%.

Membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidaklah semudah yang dibayangkan, terlebih pada era globalisasi seperti saat sekarang. Seorang Pegawai Negeri Sipil diharapkan memiliki ketangguhan dan profesionalisme sebagai abdi negara dan abdi masyarakat khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia salah satunya dapat diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan salah satu media yang paling strategis, karena pendidikan dan pelatihan merupakan sarana yang handal untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*) pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan.

G.R. Tery dan Leslie W. Rue dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen* mengemukakan

bahwa “Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata” dari teori manajemen tersebut diurakan menjadi fungsi-fungsi manajemen yaitu: 1) Perencanaan, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. 2) Pengorganisasian, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. 3) Kepegawaian, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. 4) Memotivasi, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan. 5) Mengendalikan, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan- penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.

dan keterampilan seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tertentu”. Pendidikan dan pelatihan ini bukanlah merupakan sesuatu yang diberikan sekali saja, akan tetapi bermula dan berakhir pada satu titik dan kemudian selesai melainkan suatu kegiatan yang terus menerus karena pendidikan dan pelatihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dimana Pendidikan dapat menciptakan manusia yang berakhlak mulia, religius dan berkepribadian sebagai bangsa yang cinta damai, serta sebagai bangsa dengan tingkat produktivitas kerjanya yang tinggi.

Agar pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih mengarah penulis membatasi kalimat sebagai berikut:

- a. Perencanaan meliputi calon peserta, Ijin atasan, Waktu Pelaksanaan, Syarat calon peserta dan Penetapan ujian.
- b. Pengorganisasian meliputi , Koordinasi dengan pemangku kepentingan, rincian tugas, mekanisme, pertanggungjawaban.
- c. Pelaksanaan meliputi Modul oleh LKPP, Materi diberikan saat diklat.
- d. Evaluasi meliputi tingkat kelulusan.
- e. Hasil lulusan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

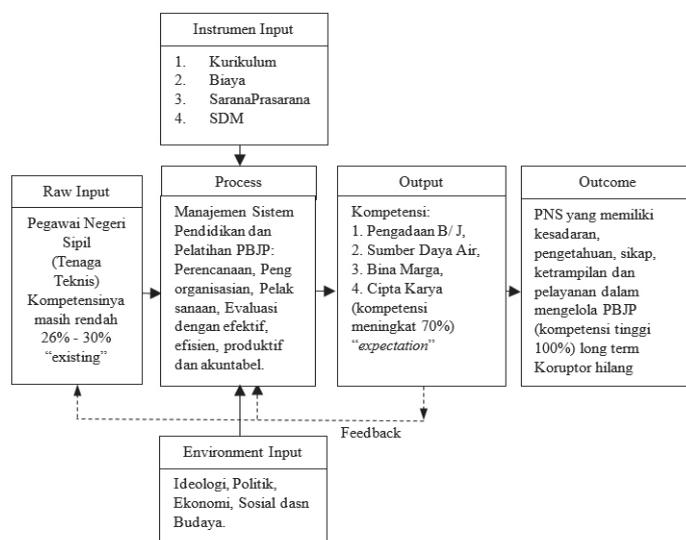
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendiskripsikan proses Sistem Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk peningkatan kopetensi tenaga teknis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan ,evaluasi dan hasil lulusan diklat.

Tabel 2. Pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016

No	Nama Pelatihan Dana DIPA	JP	Jlm Hari	Pagu Rp. (juta)	Jumlah	Pusat	Lulus	Tidak Lulus	Status	Dae-rah
1	Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	50	6	179.500	21	18	8	13	Sele-sai	3
2	Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PNBP)	47	6	138.174	28	2	9	19	Sele-sai	26
3	Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	50	6	138.174	31	13	7	24	Sele-sai	18
JUMLAH				445.848	80	33	24	56		47
					100		30	70	%	

Sumber: diolah dari DIPA Balai

John Suprihanto (1988: 86) pendidikan dan pelatihan adalah: “suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan megutamakan pembinaan, kejujuran dan ketrampilan. Sedangkan Edwin B. Flippo (1992: 52), menekankan kepada “pelatihan merupakan tindakan untuk meningkatkan pengetahuan



Gambar 1. Alur/ Kerangka Pemikiran Perumusan Masalah

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, Pendekatan kualitatif memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dikemukakan oleh Margono (2003: 37), yaitu meliputi antara lain: “Lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, Manusia merupakan alat (*instrumen*) utama pengumpul data, Analisis data dilakukan secara induktif. Artinya penelitian ini dimulai dari fakta empiris yang ditemukan peneliti dilapangan”. dengan Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen tentang Manajemen Sistem Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Balai Diklat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung.

Metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dengan kondisi apa adanya. Metode penelitian semacam ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri seperti yang di kemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1990: 279) alih bahasa oleh Munandir sebagai berikut: 1) Data diambil langsung dari setting alami, 2) penentuan sampel secara purpose, 3) peneliti sebagai instrument pokok, 4) lebih menekankan pada proses dan pada produk sehingga bersifat deskriptif analitik, 5) analisis data secara induktif atau interpretasi bersifat isilogik dan,

6) mengutamakan makna di balik data.

Tehnik penelitian digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan observasi dengan cara mendatangi tempat yang akan diteliti secara langsung ketika proses pelaksanaan kegiatan berlangsung. Jenis penelitian yang dilakukan adalah observasi non-partisipasi, sehingga peneliti duduk bersama dengan para responden selama kegiatan berlangsung. Selama observasi, peneliti memperhatikan langsung langkah-langkah dan tindakan-tindakan responden.

a. Pengumpulan Data

Langkah pertama dalam pengumpulan data, peneliti sebagai instrumen utama melakukan kunjungan ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara, observasi dan studi Dokumentasi, selanjutnya melakukan cek and ricek terhadap data yang sudah terkumpul sebagai pengumpulan data terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dari pengumpulan data, dimana data yang terkumpul telah memenuhi kebutuhan yang memungkinkan tidak akan ada penambahan data kembali.

b. Pengolahan

Dari hasil wawancara dengan intrumen kisi-kisi Penelitian terhadap Kepala Balai, Para Kepala Seksi/Bagian, Widyaiswara dan Peserta Diklat dilakukan pemilahan yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan hasil lulusan diklat.

c. Analisis Data

Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang manajemen pendidikan dan pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Balai Diklat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV

Bandung. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Apa yang dilakukan pada tahap perencanaan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi identifikasi kebutuhan belajar, perumusan tujuan, penyusunan materi pelajaran, penentuan metode pembelajaran, penentuan kegiatan pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, pemilihan alat pembelajaran, penentuan sarana prasarana, dan perencanaan evaluasi pembelajaran. 2) Apa yang dilakukan pada tahap pengorganisasian yang meliputi pengkondisian penyelenggara yang menitikberatkan kepada siapa dan berbuat apa. 3) Apa yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi pengkondisian peserta, proses pemberian informasi dan keahlian, dan penguatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah dipelajari. 4) Apa yang dilakukan pada tahap evaluasi penyelenggaraan yang meliputi pelaksanaan penilaian, pengolahan data penilaian, analisis data, dan penyajian data serta tindak lanjut penilaian pembelajaran. dan 5) Apa yang diharapkan dari hasil lulusan Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Diklat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung.

1) Perencanaan Sistem Pendidikan dan pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Balai Diklat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung untuk merencanakan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki arti pentingnya memikirkan secara matang terlebih dahulu tentang sasaran dan tindakan yang berdasarkan pada beberapa metode, rencana atau logika

dan bukan berdasarkan perasaan. Rencana mengarahkan kepada tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya.

2) Pengorganisasian Sistem Pendidikan dan pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pengorganisasian yang telah dilakukan dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibagi menjadi empat struktur organisasi diantaranya, Penyelenggara, widyaiswara/Instruktur, Peserta diklat dan Mitra kerja atau Instansi terkait. Dari keempat struktur itu mempunyai peran yang berbeda-beda untuk mendukung keberhasilan tujuan program Sistem Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan yang telah dilakukan oleh penyelenggara sesuai dengan Pengertian pengorganisasian.

3) Pelaksanaan Sistem Pendidikan dan pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan Pendidikan kePUPRan akan mengarah kepada pengembangan Lembaga Pendidikan sebagai centre for excellence perlu mengarah pemberian dorongan untuk mencapai tujuan.

4) Evaluasi Sistem Pendidikan dan pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tahap akhir dari manajemen adalah pengendalian atau evaluasi, proses ini bagaimana cara pemantauan yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan strategi pilihan apakah terjadi penyimpangan atau kesenjangan. Tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa kebijakan dan rencana-rencana telah dilaksanakan atau tidak, selanjutnya dilakukan evaluasi sebagai langkah akhir untuk membandingkan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau tidak sesuai dengan tujuan yang digariskan organisasi.

- 5) Hasil Lulusan Sistem Pendidikan dan pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pegawai Negeri sebagaimana yang tercantum dalam peraturan UU ASN no 5 tahun 2014 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil : Setiap PNS mengabdikan dirinya sebagai Aparatur Pemerintah menjadi pelayan masyarakat dan memiliki kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Simpulan

Kegiatan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung menggunakan fungsi manajemen mulai dari Perencanaan, Penorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi. Rangkaian teori tersebut dilaksanakan tahap demi tahap dan proses belajar mengajar berjalan lancar, namun tingkat kelulusan ujian sertifikasi tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih dibawah 30%.

Rekomendasi

Rekomendasi diberikan kepada Kepala Balai segera membuat Rencana Strategis Balai Diklat dengan menggunakan potensi yang ada, mengusulkan ke Pusdiklat penambahan materi Integritas untuk menjawab unsur sikap/perilaku dan mengingatkan agar tidak Korupsi, kolusi dan Nepotisme; Kepala Seksi Program dan Pelayanan yang meliputi penjabaran program dari Renstra dibuat rincian diklat tahunan; Kepala Seksi Penyelenggaraan, membuat secara rinci masing-masing diklat meliputi tanggal pelaksanaan, jam kegiatan, masing-masing mata diklat; melakukan koordinasi kepada Widyaiswara/Instruktur, pengecekan ruang kelas termasuk kelengkapannya, menempatkan petugas sebagai cost director setiap diklat; menyiapkan materi e-learning. Membuat target tingkat kelulusan sertifikasi PBJP tingkat dasar meningkat dari 30% ke 50%., Kepala SubBagian Tata Usaha membuat konsep Surat Keputusan Kepala Balai tentang organisasi pelaksanaan Diklat dengan lampiran setiap diklat ditentukan pegawainya secara jelas, siapa ditugasi apa; dan Kelompok Jabatan Fungsional diberikan tugas membantu dalam penyelenggaraan diklat mulai dari menyiapkan/pembuatan kurikulum, Modul, Bahan ajar, pengaturan ruangan maupun materi kediklatan.

Daftar Pustaka:

- Al Qur'an, Surat Al Isra ayat 36 dan Surat Al Ahzab ayat 72
- Alfian, (2015). Pemetaan jenis dan resiko kecurangan dalam audit pengadaan barang dan jasa. *Jurnal pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah*. Volume 4.
- Alim, Zamu. (2013). Sertifikat kompetensi sebagai standar kompetensi kerja; *Forum manajemen* vol. 06 no. 1
- Arikunto, Suharsimi. (1996). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*: Bumi Aksara.
- Daryanto, H. (2012). *Evaluasi Pendidikan*: PT Rineka Cipta.
- Handayani, Soewarno. (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Ke enam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard. (terj. Agus Darma). (1988). *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kamil Mustofa. (2012). *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, H.E. (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah RI nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil.
- Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya.
- Rosidah (2008) "Manajemen Pendidikan dan Pelatihan dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Pegawai Publik" Tesis.
- Sadulloh, Uyoh. (2006). *Pengantar Filsafat Pendidikan*: Alfabeta Bandung.
- SANKRI. (2002). *Definisi pendidikan dan pelatihan*: Lembaga Administrasi Negara.
- Sa'ud, Udin Syaefudin; Makmun, Abin Syamsuddin. (2011). *Perencanaan Pendidikan. Suatu Pendekatan Komprehensif*: PT Remaja Rosdakarya.
- Sauri, Sofyan. (2011). *Filsafat dan Teosofat Akhlak*. Kajian filosofis dan teosofis tentang akhlak, karakter, nilai, moral, etika, budi pekerti, tatakrama, dan sopan santun: Rizqi Press.
- Syahayani, Zihan (2017), hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. (Kompas.com, 28/ 9/ 2017)
- Sauri, Sofyan; Firmansyah, Herlan; Rizal, Ahmad Syamsu. (2010). *Filsafat Ilmu Pendidikan Agama*: CV Arfindo Raya.
- Syah, Muhibbin. (2011). *Psikologi Pendidikan*: PT Remaja Rosdakarya.
- Terry, George R. (2016). (terj. J. Smith. D.F.M). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W. (2016). (terj. G.A. Ticoalu). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.